

## **Ujian Nasional dan Problematika Standarisasi**

*Oleh : Fahriza Marta Tanjung\**

Dalam hitungan beberapa hari ke depan, siswa tingkat akhir pada setiap satuan pendidikan akan mengikuti sebuah perhelatan akbar yang diberi nama Ujian Nasional (UN). Walaupun pemerintah telah menyosialisasikan bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan, tak urung membuat para siswa gusar dan *ketar-ketir* menghadapinya. Bayangan kegagalan dalam UN terus menggelayuti, apalagi hasil *try out* yang dilakukan di kebanyakan sekolah, rata-rata hanya di bawah 50 % yang memenuhi kriteria kelulusan.

Terlepas dari kekhawatiran siswa, yang diikuti oleh kegusaran sekolah dan kegelisahan orang tua, UN terus mendapatkan kritik. Banyak wacana yang disampaikan oleh berbagai pihak, tak membuat Depdiknas gentar untuk melaksanakannya. Mulai dari persoalan UN yang merampas hak guru untuk melakukan evaluasi, tak sesuai dengan prinsip KTSP, tak layakunya UN dijadikan alat pengukur mutu pendidikan karena hanya mengujikan 3 mata pelajaran, banyaknya kecurangan yang terjadi sampai dengan wacana pelanggaran HAM. Bahkan penolakan mayoritas dari anggota DPR pun tak digubris oleh Depdiknas.

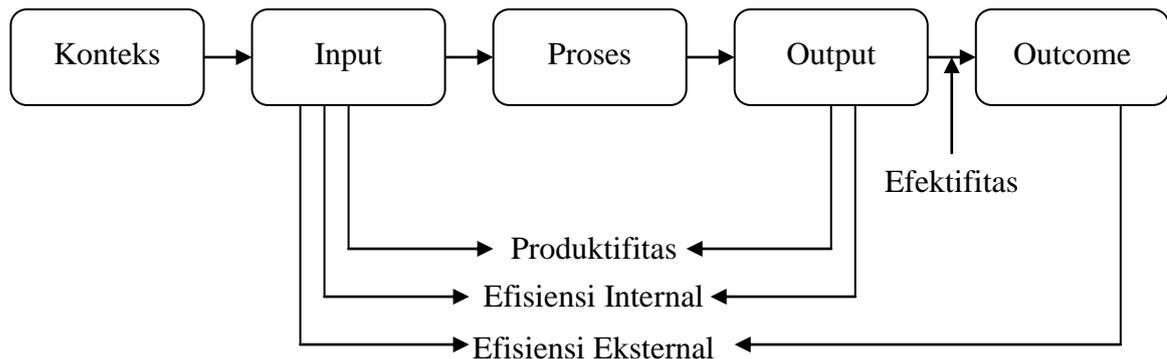
Sebenarnya, wacana-wacana tersebut hanya merupakan bagian dari sebuah sistem pada suatu satuan pendidikan yang dapat dilihat secara makro sehingga perlu dilakukan upaya analisis yang benar-benar prinsipil dan sangat mendasar berkaitan dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

---

\* Penulis adalah Guru SMKN 1 Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan aktif pada Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR)

## Satuan Pendidikan Sebagai Sistem

Menurut Prof. Slamet PH (2006) upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan ditempuh dengan menggunakan pendekatan sistem. Secara visual, satuan pendidikan sebagai sistem digambarkan pada bagan berikut :



Gambar 1. Satuan Pendidikan sebagai suatu sistem

Lebih lanjut Prof. Slamet PH (2006) menyebutkan bahwa *konteks* yang dimaksud adalah berkaitan dengan kondisi kekinian yang tengah berkembang di masyarakat seperti tuntutan pengembangan diri, peluang lulusan, dukungan DPR, pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah, kemajuan Ipteks, nilai dan harapan masyarakat serta tuntutan otonomi dan globalisasi. *Input* berkaitan dengan perangkat yang harus disediakan untuk menjalankan sebuah sekolah seperti visi, misi, tujuan dan sasaran, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan pra sarana, dana, regulasi, organisasi, administrasi, peran serta masyarakat dan budaya sekolah.

Kemudian *proses* merupakan pelaksanaan proses belajar mengajar itu sendiri, baik tatap muka di depan kelas maupun bentuk pembelajaran lainnya yang

dapat dilakukan di sekolah, lingkungan dan keluarga. *Output* merupakan hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran dengan input yang tersedia berupa prestasi akademik dan non akademik, angka yang mengulang serta angka putus sekolah. Sedangkan *out come* adalah dampak yang diberikan dari output yang dihasilkan berkaitan dengan kesempatan pendidikan, kesempatan kerja dan pengembangan diri lulusan.

Berdasarkan bagan di atas, untuk berharap hasil (lulusan) yang kompeten maka harus dimulai dari kemampuan untuk mengidentifikasi konteks dengan benar, penyediaan input yang bagus dan proses pembelajaran yang baik. Lalu dimana keberadaan dari UN itu sendiri ?

### **UN : Standar Output**

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Hal ini kembali ditegaskan dalam PP Nomor 19 tahun 2005, bahwa UN merupakan penilaian hasil belajar yang dilakukan pemerintah untuk mengukur peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Jadi jelas, bahwa UN merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dari proses pembelajaran. UN juga dilakukan untuk mengukur pencapaian standar nasional pendidikan. Artinya, UN merupakan instrumen yang terstandar untuk melihat output pendidikan. Dengan sendirinya,

output pendidikan telah distandarkan dengan adanya UN yang dilakukan secara nasional.

Menjadi aneh, ketika output pendidikan sudah distandarkan, ternyata komponen input maupun proses pendidikan kita masih amburadul. Sampai dengan saat ini pemerintah baru melakukan standarisasi terhadap isi (kurikulum) dan kompetensi lulusan serta pendidik melalui uji sertifikasi guru, yang kesemuanya masih dalam tahap kebijakan.

Dengan kasat mata bisa dilihat bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang gedungnya hampir rubuh, kekurangan guru, tidak memiliki perpustakaan, belajar di tenda dan tidak memiliki alat peraga. Apalagi mau bicara laboratorium bahasa, kimia, fisika, biologi atau komputer, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Artinya, komponen input dan proses pendidikan masih belum terstandar. Mengapa harus diukur pencapaiannya dengan menggunakan UN yang sudah terstandar?

### **Memposisikan UN Seharusnya**

Seperti yang disebutkan dalam PP tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa UN itu memiliki fungsi yaitu pemetaan mutu pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentu kelulusan peserta didik serta pertimbangan untuk pembinaan dan pemberi bantuan kepada satuan pendidikan.

Sebagai alat untuk memetakan pendidikan, jelas UN hanya mengukur sebagian pencapaian hasil belajar siswa. UN hanya menguji 3 mata pelajaran 10 mata pelajaran untuk SMP dan 16 mata pelajaran untuk SMA. UN pun hanya

mengukur aspek kecerdasan kognitif saja. Padahal tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Artinya, pendidikan harus mampu mencetak manusia yang memiliki kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotorik.

Lebih baik jika ingin memetakan mutu pendidikan dilakukan dengan penelitian yang menggunakan metode ilmiah dan objektif. Tidak perlu semua siswa diuji dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Semua aspek kecerdasan siswa dapat dinilai. Bukan itu saja, penelitian seperti ini juga dapat melihat sejauh mana manajemen sekolah, kurikulum, guru atau yang lainnya berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa.

Demikian juga ketika berbicara UN sebagai penentu kelulusan. UN telah merampas hak guru untuk melakukan evaluasi terhadap siswanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan oleh guru untuk memantau, proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pendidikan kita tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Untuk mengukur sikap dan keterampilan ini tentunya guru lebih memiliki otoritas dari pada UN, yang lagi-lagi, hanya mengukur sebagian kecil hasil belajar siswa.

Sebagai pertimbangan untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan, kenyataannya yang terjadi tidak seperti itu. Sekolah yang memiliki nilai UN tinggi, biasanya berada di kota dan sekolah negeri, akan lebih

sering mendapatkan bantuan dari pada sekolah yang memiliki nilai UN rendah, biasanya berada di desa. Apalagi, bantuan pemerintah selalu menyaratkan kondisi tertentu untuk mendapatkan bantuan yang cenderung lebih mudah dipenuhi oleh sekolah-sekolah yang mapan. Sekolah yang sudah maju, semakin maju dan sekolah yang tertinggal semakin tertinggal. Seharusnya sekolah yang tertinggallah yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan.

UN, mungkin, hanya bermanfaat untuk pertimbangan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu pun hanya untuk tingkat SMP dan SMA. Ketika akan masuk ke perguruan tinggi, tetap diadakan SPMB.

Jelas, UN tidak layak untuk diselenggarakan karena tidak mampu menjalankan fungsi yang telah digariskan dengan baik. Lebih baik UN ditiadakan atau kalau tetap diadakan, standarisasi terlebih dahulu komponen-komponen input mau pun proses pendidikan itu sendiri.

### **Catatan Akhir**

Perdebatan tentang UN, bakal tidak akan ada habis-habisnya ketika masing-masing komponen pendidikan itu sendiri lebih mementingkan egonya. Masih lekat dalam ingatan ketika Wapres mencela para Profesor dan Doktor yang dikatakan tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan. Seharusnya, semua berangkat dari visi dan cara pandang yang sama. Mulai dari sekarang, kita pikirkan, apa visi pendidikan kita? Masihkah kita memiliki visi yang sama sesuai dengan tujuan pendidikan kita?